

## ***KONDISI AKTUAL BP 3 BANDA ACEH***

### **A. Kondisi Perkantoran dan Pelestarian**

Sesuai Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.51/OT.001/MKP/2003 Tanggal 5 Desember 2003 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala, BP3 Banda Aceh dengan wilayah kerja Propinsi Aceh dan Sumatera Utara mempunyai tugas melaksanakan pemeliharaan, perlindungan, pemugaran, dokumentasi, bimbingan dan penyuluhan, serta penyidikan dan pengamanan terhadap peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs, termasuk yang berada di lapangan maupun tersimpan di ruangan. Untuk menyelenggarakan tugas pokok di atas, maka BP3 Banda Aceh menjalankan fungsi sebagai berikut :

- a) Melaksanakan pemeliharaan, pengelolaan dan pemanfaatan peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs peninggalan arkeologi bawah air
- b) Melaksanakan perlindungan peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs termasuk yang berada di lapangan maupun yang tersimpan di ruangan.
- c) Melaksanakan pemugaran peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs termasuk yang berada di lapangan maupun yang tersimpan di dalam ruangan
- d) Melaksanakan dokumentasi peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs termasuk yang berada di lapangan maupun yang tersimpan di dalam ruangan
- e) Melaksanakan penyidikan dan pengamanan peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs termasuk yang berada di lapangan maupun yang tersimpan di dalam ruangan
- f) Melaksanakan pemberian bimbingan/penyuluhan terhadap masyarakat tentang peninggalan sejarah dan purbakala

- g) Melaksanakan penetapan benda cagar budaya bergerak di wilayah kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala
- h) Melaksanakan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala.

- **Sumber Daya Manusia**

Dalam menyelenggarakan fungsi tersebut di atas, sumber daya manusia di BP 3 Banda Aceh terdiri atas 42 orang pegawai yang terbagi ke dalam 2 bagian yaitu, teknis sebanyak 24 orang dan umum sebanyak 17 orang. Di luar itu terdapat 5 orang tenaga keamanan honorer, dan 154 orang juru pelihara honorer. SDM berijazah sarjana arkeologi di bagian teknis berjumlah 6 orang, dan dari jumlah total pegawai tersebut ada 1 orang pegawai yang telah mencapai usia pensiun pada triwulan pertama 2010 yaitu salah seorang pejabat struktural (Kepala).

- **Sarana perkantoran dan teknis**

Kegiatan perkantoran sehari-hari dilaksanakan dengan menggunakan peralatan yang diperoleh dari pengadaan tahun 2009, yang disesuaikan dengan kondisi kantor sementara yang berlokasi di Balai Penyelamatan BCB di Situs Tamansari Gunongan. Kondisi kantor sementara tersebut tidak sama dengan bangunan kantor yang direhabilitasi, sehingga ketika operasional perkantoran dilaksanakan di lokasi baru, masih dibutuhkan penambahan sarana perkantoran seperti komputer dan printer. Sementara itu sarana teknis memang masih belum memadai, seperti misalnya peralatan survey, peralatan penggalian, peralatan bawah air (peralatan selam), dan belum lengkapnya perangkat pengujian bahan konservan yang berkaitan dengan lokasi lama yang belum memiliki ruang untuk laboratorium.

- **Pemeliharaan situs/benda cagar budaya**

Hingga triwulan pertama 2010 upaya pemeliharaan harian situs/benda cagar budaya di wilayah kerja BP 3 Banda Aceh masih dilakukan oleh juru pelihara yang berjumlah 154 orang. Mereka bertanggungjawab memelihara sebanyak 118 situs/benda cagar budaya atau sekitar 23,6 % dari keseluruhan situs/benda cagar budaya yang tersebar di

wilayah kerja BP 3 Banda Aceh. Belum semua situs/benda cagar budaya dipelihara karena harus diverifikasi ulang mengenai kondisinya, selain itu ada beberapa situs yang mendapat dana pemeliharaan dari pemerintah daerah setempat. Data ini pun masih harus disinkronkan melalui mekanisme rapat koordinasi agar tidak terjadi pengalokasian dana yang tidak tepat sasaran, dan mengutamakan pembagian kewenangan yang seimbang antara pusat dan daerah. Pemeliharaan yang sifatnya tidak rutin atau insidentil dilakukan oleh BP 3 Banda Aceh melalui kegiatan-kegiatan konservasi, rekonstruksi dan pemugaran. Adapun untuk kegiatan pemugaran, tidak dilaksanakan setiap tahun. Pemugaran yang terakhir dilakukan adalah pemugaran pada benteng induk Indrapatra di Aceh Besar tahun 2008. Sedangkan kegiatan konservasi masih mendapat porsi yang tetap setiap tahun, dan sifatnya adalah konservasi dengan teknik mekanis kering – basah yang menggunakan bahan-bahan alamiah. Untuk konservasi yang sifatnya mekanis rekonstruktif misalnya penyambungan, digunakan bantuan bahan kimiawi berupa lem batu dengan perkuatan angkur berbahan logam.

- **Dokumentasi/inventarisasi dan perlindungan**

Selama 5 tahun terakhir data situs/benda cagar budaya yang didokumentasikan diperoleh dari kegiatan pendataan. Setiap tahun dilaksanakan minimal 1 kali pendataan yang menjangkau 1 kabupaten. Pada beberapa kesempatan dilakukan 2 kali pendataan dalam setahun. Belum semua hasil dokumentasi dibuat dalam bentuk digital. Selain pendataan juga dilakukan monitoring yang dapat digunakan untuk memverifikasi ulang daerah yang pernah didata untuk memperoleh informasi terakhir dari kondisi situs. Misalnya sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah maka beberapa situs berubah data lokasi administratifnya, atau beberapa situs dapat dihapus dari daftar sehubungan dengan kejadian bencana alam. Pengusulan situs menjadi benda cagar budaya yang memiliki surat keputusan benda cagar budaya yang dilindungi belum secara rutin dilakukan, sehubungan dengan kendala kurangnya sumber daya manusia. Hal ini berpengaruh terhadap terjadinya kasus-kasus pelanggaran yang berawal dari kurangnya sosialisasi UU BCB dan tidak adanya status yang jelas dari sebuah situs/benda cagar budaya. Upaya perlindungan situs secara minimal dilakukan melalui pemasangan papan nama dan papan larangan merusak situs. Akan tetapi upaya ini

pun memiliki keterbatasan dari segi jumlah dan area yang dapat dilindungi terkait dengan pendanaan. Kerjasama dengan pihak daerah dalam upaya perlindungan masih sangat terbatas. Sifatnya lebih pada tindakan darurat seperti rekonstruksi kompleks makam Syiah Kuala, dan penggalian penyelamatan pada situs yang terancam perusakan seperti yang terjadi di situs Benteng Puteri Hijau Kabupaten Deli Serdang. Adapun tindak pencurian benda cagar budaya seperti yang terjadi pada arca-arca mejan di Kabupaten Dairi dan Pakpak Bharat belum dapat ditangani akibat keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi untuk penanganan kasus.

- **Publikasi dan pemanfaatan situs/benda cagar budaya**

Dalam upaya mempublikasikan kepurbakalaan dan berbagai aspeknya di wilayah kerja BP 3 Banda Aceh, telah dilakukan beberapa kegiatan rutin diantaranya pameran foto dan benda cagar budaya, seminar yang pelaksanaannya bekerjasama dengan Museum Negeri Sumatera Utara, sosialisasi UU BCB, pembuatan barang cetakan dan terbitan yaitu jurnal kepurbakalaan “Arabesk”, Album Budaya, pembuatan leaflet, poster, banner dan kalender. Untuk kegiatan pameran, ada sebuah acara tetap tahunan yang selalu diikuti yaitu pameran bersama UPT kepurbakalaan se-Sumatera. Adapun untuk skala yang lebih kecil telah dilakukan pameran foto dan benda bercorak kebudayaan lokal koleksi BP 3, dimana sasaran utama publikasinya adalah para siswa sekolah dari tingkat dasar sampai menengah, walaupun animo dari masyarakat umum lainnya cukup baik. Dalam pelaksanaan kegiatan publikasi, kerjasama dengan pihak daerah yaitu Dinas Kebudayaan dan UPTD Museum dalam bidang sosialisasi UU BCB dapat berjalan dengan cukup baik, walaupun masih dapat lebih ditingkatkan.

Berkenaan dengan pemanfaatan situs dan benda cagar budaya di wilayah kerja BP 3 Banda Aceh yang meliputi Propinsi Aceh dan Sumatera Utara, telah ada beberapa jenis pemanfaatan terutama dalam bidang pariwisata. Sebagai contoh, situs Tamansari Gunongan dan Masjid Baiturrahman di Banda Aceh telah sejak lama menjadi tujuan wisata baik wisatawan nusantara maupun mancanegara terutama bagi wisatawan dari negara tetangga (Malaysia) yang memiliki keterkaitan sejarah dengan Kesultanan Aceh Darussalam di masa lalu. Pemanfaatan situs dalam bidang pariwisata juga terjadi di

Sumatera Utara yaitu di komplek Candi Bahal I yang setiap liburan hari raya keagamaan menjadi tempat tujuan wisata yang cukup ramai, walaupun belum didukung oleh sarana yang memadai. Pemanfaatan dalam bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan belum begitu banyak dilakukan, begitu pula dengan wisata ziarah sehubungan dengan banyaknya makam ulama besar yang ada baik di Aceh maupun di Sumatera Utara.

- **Penyusunan program kerja**

Setiap tahun anggaran, dimulai dengan perencanaan yang dilakukan pada tahun sebelumnya. Selama 5 tahun belakangan perencanaan program kegiatan masih bersifat monoton, tidak banyak terjadi terobosan dan masih cukup banyak kegiatan yang belum mendukung pelestarian yang dapat dipertanggung jawabkan secara arkeologis serta berwawasan kebudayaan. Hal ini terjadi antara lain karena belum terjadi perimbangan antara kegiatan swakelola dan kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak ketiga. Minimnya pengawasan dan pembinaan dari pusat juga ikut andil dalam hal ini, sehingga perencanaan program kegiatan selama 5 tahun terakhir menjadi kurang optimal.

## **B. Rencana Strategis untuk mencapai kondisi yang diharapkan**

Tuntutan tugas yang memiliki konsekuensi dan tanggung jawab profesi yang cukup berat, harus disikapi dengan serius dan sungguh-sungguh, terlebih lagi dalam menyongsong kompensasi berupa remunerasi yang didasarkan pada penilaian kinerja di tahun-tahun mendatang. Dalam hal perencanaan program, bahkan telah dimulai dengan digunakannya aplikasi baru dari Kementerian Keuangan yang dirancang dengan konsep *Performance Based Budgeting* (Perencanaan Anggaran Berbasis Kinerja). Dalam mensikapi hal tersebut di atas rencana strategis yang ditetapkan untuk mencapai kondisi yang diharapkan terjadi di BP 3 Banda Aceh adalah sebagai berikut :

- **Sumber Daya Manusia**

Jumlah pegawai secara umum belum mencukupi, apalagi bila dicermati tingkat kompetensi pegawai lama yang cukup rendah dan belum dapat ditingkatkan dalam

waktu singkat, dibandingkan dengan beban kerja di Propinsi Aceh dan Propinsi Sumatera Utara yang menjadi tanggung jawab BP 3 Banda Aceh. Rencana strategis 5 tahun ke depan di bidang kepegawaian adalah untuk menambah tenaga baru berusia muda, terutama di bagian teknis arkeologis, tenaga berkualifikasi pendidikan hukum untuk penanganan kasus, tenaga laboratorium, tenaga perpustakaan, dan pegawai baru di bagian umum berpendidikan sederajat SMU untuk membantu administrasi. Jumlah pegawai yang diproyeksikan untuk 5 tahun ke depan adalah tidak kurang dari 50 orang. Adapun untuk tenaga keamanan, perlu untuk ditambah berkenaan dengan telah digunakannya kantor baru, sehingga perlu penambahan tenaga satuan pengamanan, dengan jumlah minimal 8 orang satpam untuk 2 lokasi yaitu kantor BP 3 dan Balai Penyelamatan BCB di situs Tamansari Gunongan.

Kondisi aktual sumber daya manusia di BP 3 Banda Aceh masih sangat rendah tingkat kompetensinya. SDM bidang administrasi dan keuangan perlu ditingkatkan pengetahuannya dalam hal ilmu aplikasi komputer perkantoran, mengingat semua pelaporan administrasi dan keuangan telah menggunakan aplikasi khusus dari Kementerian Keuangan. Dalam kurun waktu 5 tahun terakhir di bagian keuangan terlalu banyak diadakan pelatihan di bidang pengadaan barang dan jasa, dan mengabaikan penguasaan aplikasi dasar yang justru menjadi tugas pokok sehari-hari. SDM di bidang teknis selama ini kurang pengalaman dalam penanganan konservasi bahan batu dan kayu, bidang pemugaran, dan survey peninggalan bawah air.

Rencana strategis bidang sumber daya manusia untuk 5 tahun ke depan adalah meningkatkan kualitas SDM di BP 3 Banda Aceh secara bertahap. Dimulai dengan memberikan motivasi untuk meningkatkan kedisiplinan, kesadaran dan tanggung jawab sebagai abdi negara yang loyal dan mengubah paradigma lama yang hanya berorientasi pada hak tetapi mengabaikan kewajiban, menjadi paradigma baru yang mengutamakan kewajiban sebagai pegawai yang dibayar oleh negara untuk bekerja.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi direncanakan untuk mengadakan pelatihan sendiri baik administrasi maupun teknis, dan untuk menambah pengalaman di bidang teknis, direncanakan untuk mengikutsertakan pegawai dalam diklat yang diadakan oleh pusat, dan mengirim pegawai untuk melakukan pemagangan di UPT lain yang lebih tinggi tingkat kompetensinya di bidang teknis.

- **Sarana Perkantoran dan Teknis**

Salah satu kondisi aktual yang menjadi kendala dalam menjalankan fungsi pelestarian dan pemanfaatan situs/bcb adalah belum lengkapnya sarana baik dalam bidang perkantoran secara umum maupun sarana teknis. Jumlah pegawai belum diimbangi dengan jumlah peralatan mesin kantor yang memadai, misalnya komputer dan printer sehingga cukup banyak pekerjaan seperti pembuatan laporan kegiatan yang tertunda penyelesaiannya hanya karena kurangnya peralatan tersebut. Masalah lain yang sangat mempengaruhi kinerja perkantoran adalah tenaga listrik. Pemadaman listrik yang sangat sering terjadi cukup mengganggu proses kerja perkantoran. Rencana strategis yang disusun untuk mencapai kondisi yang diharapkan sampai 5 tahun ke depan adalah menambah peralatan perkantoran berupa komputer dan printer serta menyediakan generator yang berdaya minimal 5 KVA (5.000 watt) untuk keadaan darurat, serta menambah UPS (Uninterruptible Power Source) pada setiap unit komputer untuk mencegah terjadinya kerusakan akibat padamnya listrik.

Kondisi aktual peralatan teknis masih sangat kurang, yaitu belum lengkapnya peralatan laboratorium, kurangnya peralatan survey (GPS dan Handy Talky), peralatan dokumentasi lapangan (laptop dan kamera digital), dan belum adanya perlengkapan survey peninggalan bawah air (peralatan selam). Rencana strategis yang disusun berkaitan dengan sarana peralatan teknis untuk mencapai kondisi yang diharapkan dalam 5 tahun ke depan adalah melengkapi peralatan laboratorium hingga dapat difungsikan untuk pengujian bahan konservan dan konservasi barang temuan, serta menambah jumlah peralatan teknis lapangan yaitu GPS, Handy Talky, Laptop, Kamera digital dan peralatan selam untuk survey peninggalan bawah air.

- **Pemeliharaan situs/benda cagar budaya**

Rencana strategis untuk 5 tahun ke depan yang berkaitan dengan pemeliharaan situs/benda cagar budaya, adalah melaksanakannya dengan kembali berpedoman pada prinsip-prinsip arkeologis dan memperketat pengawasan pada kegiatan yang dilaksanakan oleh rekanan. Semua kegiatan yang dilaksanakan oleh pihak rekanan harus diawasi oleh tenaga teknis sejak awal sampai dengan proses serah terima. Sejalan dengan rencana strategis di bidang SDM teknis, maka diharapkan dalam 5

tahun ke depan, kualitas pemeliharaan lebih meningkat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara arkeologis. Setiap kegiatan yang bersifat rekonstruktif terhadap situs/bcb secara langsung seperti konservasi dan pemugaran harus didahului oleh studi teknis, untuk mengetahui tindak penanganan yang paling tepat.

Dalam jangka waktu 5 tahun ke depan harus terjalin koordinasi yang lebih erat dengan daerah dalam bidang pemeliharaan situs/bcb, agar tidak terjadi lagi pengalokasian dana yang tidak tepat sasaran dan pemeliharaan yang menyalahi prinsip arkeologis. Fungsi konsultatif terhadap pengemban pelestarian di daerah oleh BP 3 Banda Aceh sebagai UPT pusat bidang pelestarian situs/bcb harus bisa dijalankan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan. Hal ini harus didahului oleh konsolidasi internal BP 3 Banda Aceh yang diikuti dengan sosialisasi keberadaan BP 3 Banda Aceh sendiri yang selama 5 tahun belakangan ini berkesan tidak dikenal oleh para pemangku kepentingan pelestarian situs/bcb di wilayah kerjanya.

Berkaitan dengan tenaga juru pelihara honorer, jumlah tenaga sebanyak 154 orang belum perlu ditambah, karena jauh lebih penting untuk melibatkan anggaran daerah yang juga memiliki tanggungjawab dalam pelestarian. Dalam hal ini rencana strategis yang disusun adalah menjalin koordinasi intensif dengan daerah di bidang pemeliharaan, lebih diutamakan untuk menjangkau situs/bcb yang dapat dipelihara dengan dana dari daerah. Setidaknya ditargetkan hingga akhir tahun 2014 persentase pemeliharaan rutin situs dapat meningkat menjadi 35 % dari jumlah total dengan bantuan alokasi dana pemeliharaan yang berasal dari partisipasi daerah.

- **Dokumentasi/inventarisasi dan perlindungan**

Mensikapi instruksi dari pusat dalam menghimpun data situs/bcb yang akan didaftarkan sebagai situs/bcb yang dilindungi undang-undang, maka rencana strategis yang disusun adalah memperbaharui basis data situs/bcb di Propinsi Aceh dan Sumatera Utara, sebagai dasar bagi seleksi kelayakan situs/bcb untuk didaftarkan. Setelah basis data diperbaharui maka setiap tahun menjadi tugas kelompok registrasi dan penetapan untuk melakukan *update* terhadap basis data tersebut. Pembaharuan basis data pada triwulan pertama 2010 dilakukan dengan cara monitoring di daerah



yang telah didata, dan ditambah dengan kegiatan pendataan rutin, pada triwulan ketiga tahun 2010 diharapkan telah terbentuk basis data yang paling lengkap dari seluruh situs/bcb di Propinsi Aceh dan Sumatera Utara. Setelah tersusun basis data yang diikuti dengan pengusulan penetapan, diharapkan dalam jangka waktu 5 tahun ke depan pelanggaran terhadap situs/bcb di wilayah kerja BP 3 Banda Aceh akan semakin berkurang.

Termasuk ke dalam rencana strategis di bidang dokumentasi, inventarisasi dan perlindungan adalah kegiatan penyusunan basis data dokumentasi foto yang diikuti dengan digitalisasi. Dalam jangka waktu 5 tahun diharapkan telah dapat disusun suatu basis data foto yang lengkap, mulai dari film negatif, foto cetakan, foto bahan pameran dan diikuti dengan digitalisasi. Selain itu juga akan dilakukan upaya menghimpun data foto lama situs/bcb di wilayah kerja BP 3 Aceh koleksi Dinas Purbakala masa penjajahan Belanda yang terkumpul di Jakarta. Dalam hal perlindungan, aspek perlindungan yuridis akan mendapat perhatian yang seimbang dengan aspek perlindungan fisik. Sejalan dengan rencana strategis di bidang SDM, maka pegawai yang berkualifikasi pendidikan hukum dan pegawai yang telah mendapat diklat penyidikan serta berstatus PPNS harus dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam menangani setiap kasus pelanggaran terhadap situs/bcb. Selama 5 tahun belakangan hanya perlindungan situs/bcb secara fisik saja yang mendapat perhatian yaitu membangun pagar keliling yang megah, tetapi mengabaikan perlindungan hukumnya yaitu pengusulan penetapan sebagai bcb yang dilindungi undang-undang. Oleh karena itu kegiatan perlindungan berkaitan erat dengan kegiatan registrasi dan inventarisasi situs/bcb sehingga harus saling mendukung dan bekerjasama.

- **Publikasi dan pemanfaatan situs/benda cagar budaya**

Di dalam bidang publikasi, kondisi aktual yang ada telah memperlihatkan kemajuan dibandingkan satu dasawarsa terakhir, yang dibuktikan dengan adanya terobosan-terobosan berupa dibuatnya barang-barang cetakan seperti poster, banner, pin, leaflet, brosur dan kalender yang secara tidak langsung menjadi media publikasi yang efektif. Terbukti dari digunakannya produk-produk tersebut sebagai souvenir dalam kegiatan-kegiatan yang melibatkan massa. Pesan-pesan pelestarian situs/bcb yang dimuat di

dalam poster, pin, dan kalender dapat tersebar ke segmen masyarakat yang hampir tidak terbatas. Oleh karena itu rencana strategis dalam bidang publikasi situs/bcb adalah meningkatkan volume dan jenis dari produk-produk publikasi yang membantu upaya sosialisasi pelestarian situs/bcb sekaligus lebih menonjolkan gambaran yang baik tentang BP 3 Banda Aceh sebagai sebuah institusi. Sementara itu dalam hal pemanfaatan situs/bcb rencana strategis yang disusun untuk lima tahun ke depan adalah menggiatkan kerjasama dengan berbagai pihak terkait di daerah untuk lebih mendorong dimanfaatkannya situs/bcb di wilayah kerja BP 3 Banda Aceh di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan yaitu sebagai sarana pembelajaran khususnya tentang sejarah nasional Indonesia.

- **Penyusunan program kerja**

Rencana strategis di bidang penyusunan program kerja adalah evaluasi menyeluruh terhadap setiap komponen perencanaan. Dalam jangka waktu lima tahun ke depan diharapkan setiap usulan kegiatan teknis telah dibuat dengan prinsip sasaran yang terukur, berwawasan kebudayaan dan dapat dipertanggungjawabkan secara arkeologis. Diupayakan pula untuk memikirkan terobosan-terobosan baru dalam hal perencanaan, sehingga penyusunan program kerja tidak lagi seperti era satu dasawarsa yang lalu. Setiap berakhir satu tahun anggaran akan diadakan rapat koordinasi internal yang digunakan sebagai sarana evaluasi terhadap hasil kegiatan, dimana masing-masing kelompok kerja saling memberikan umpan balik terhadap kelompok kerja lainnya. Dengan cara ini diharapkan akan tercipta iklim yang kondusif dalam bekerja dan munculnya gagasan kegiatan baru.